ALIRAN ILMU NEGARA MENURUT ALIRAN CALVANIS

SARI ADE GUSTINI

sari.adegustini@gmail.com

NIM 1810095600059

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang

A. PENDAHULUAN

Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda *staatsleer* yang diambil dari istilah bahasa Jerman “*Staatslehre*” yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang Sarjana Jerman bernama Georg Jellinek dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre*. Itulah sebabnya Georg Jellinek dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara. Sementara itu, menurut Roelof Kranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara.

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan Hukum Tata Negara. Maka pertama-tama yang harus dijelaskan adalah arti dari pada ilmu pengetahuan. Ilmu Pengetahuan adalah hasil pemikiran yang obyektif dan disusun secara sistematis. Beberapa syarat suatu pengetahuan merupakan karya ilmiah; pertama yaitu syarat obyektif tetapi ilmu pengetahuan harus dapat mengejar kebenaran yang dapat diterima umum. Syarat kedua adalah syarat sistematis dimana pengertian yang diperolehnya tidak boleh berceraiberaikan, melainkan satu kesatuan.

Unsur-unsur ideal ilmu pengetahuan dapat bersumber pada akal pikiran manusia atau pada perasaannya. Jika suatu bangunan hukum itu bersumber pada akal pikiran maka disebut sebagai pengertian-pengertian hukum. Dan jika bangunan hukum itu bersumber pada perasaan

maka hukum itu disebut sebagai asas-asas hukum. Demikian pula dalam ilmu negara, dikenal adanya asas-asas dan pengertian-pengertian mengenai Negara dan Hukum Tata Negara. Pengertian-pengertian dalam ilmu negara pada umumnya bersifat tetap, sedangkan asasnya seringkali berubah-ubah. Perubahan-perubahan dalam asasnya disebabkan oleh pandangan hidup dan keduniaan dari masyarakat yang berbeda-beda.

Ilmu hukum pada umumnya dapat dibagi dalam dua lapangan yang besar, yaitu :

1. Hukum Publik
2. Hukum Privat

Ilmu Negara akan mengantar kita untuk mempelajari Hukum Publik, khususnya :

- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara.

Secara sistematis materi tentang aliran aliran ilmu negara ini dibagi dalam 3 Kegiatan Belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 dengan Pengertian Ilmu Negara dan Objek Ilmu Negara. Kegiatan belajar 2 Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan dan Kegiatan Belajar 3 dengan Aliran-aliran dalam Ilmu Negara tentang pengertian Ilmu Negara dan Objek Ilmu Negara. Kelahiran dan kehadiran Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian di kenal sebagai bapak Ilmu Negara.

Selanjutnya aliran-aliran dalam ilmu negara terus mengalami perkembangan dengan munculnya beberapa aliran baru dalam ilmu negara. Dengan demikian penulis akan memberikan perumusan tentang aliran-aliran ilmu negara yang dikemukakan oleh Calvinis.

B. PEMBAHASAN

Aliran-aliran dalam Ilmu Negara, adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Untuk menguraikan paham-paham dalam Ilmu Negara mesti dimulai dari paham yang paling kuno, yaitu paham jaman Yunani Kuno. Aliran-aliran dalam Ilmu Negara menurut pendapat para filsuf jaman Yunani Kuno terdiri dari :

a. Socrates.

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas manusia adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Di sinilah tersimpul pemikiran demokratis dari Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati undang-undang. Bentuk negara Yunani Kuno masih merupakan suatu Polis. Awal mula terjadinya adalah merupakan benteng di sebuah bukit, yang makin lama makin diperkuat. Orang-orang yang ingin hidup dengan aman ikut bergabung meminta perlindungan keamanan. Benteng itu lama kelamaan semakin meluas, kelompok inilah yang kemudian dinamakan Polis. Jadi negara saat itu hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu. Oleh karena itu Polis dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik dengan negara (organisasi) yang masih berbentuk Polis itu. Sangat logis bila zaman itu dapat

dilaksanakan sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, sebab:

- ❖ Negara Yunani saat itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut Polis atau city state, negara kota.
- ❖ Persoalan yang muncul di dalam negara tersebut tidak serumit sekarang, karena jumlah warganya juga masih sedikit.
- ❖ Setiap warga negara (kecuali bayi, sakit ingatan dan budak belian) adalah negara minded, dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan seterusnya.

b. Plato

Dalam bukunya Politeia Plato menuliskan tentang bagaimanakah corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai negara yang ideal. Ilmu Negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi Polis (negara kota). Oleh karena itu Ilmu Negara diajarkan sebagai Civics/Staatsburgerlijke opvoeding yang masih merupakan sosial moral dan differensiasi ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum ada. Segala soal yang berhubungan dengan negara kota atau Polis tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara, tetapi hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk ideal. Dalam uraiannya Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:

- ❖ kehendak,
- ❖ akal pikiran,

❖ Perasaan

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini adalah seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

Paham dari Plato ini sebenarnya hanya angan-angan saja dan ia sadar bahwa negara semacam itu tidak mungkin terjadi di dalam kenyataan karena sifat manusia itu sendiri tidak sempurna. Selanjutnya ia menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal dapat dicapai disebut sebagai negara hukum. Dalam negara hukum semua orang tunduk pada hukum termasuk juga

penguasa atau raja yang kadang-kadang dapat juga bertindak sewenang-wenang. Kusnardi dan Bintang Saragih (1998).

c. Aristoteles.

Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar dengan gurunya. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama ketika kedua sarjana tersebut menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampuradukkan semua objek penyelidikannya, sedangkan Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang bernama *Politica*. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu *Ethica* merupakan pengantar daripada *Politica*. Sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia mandiri. Aristoteles menganggap bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian Aristoteles telah menjadi seorang realistik.

Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut

Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan dari desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau Polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Menurut Aristoteles adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zoon politicon. Maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa, Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian dari padanya timbulah kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasannya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara, adalah karena Ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan dunia saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat bergantung dari kebahagiaan negara. Dalam bukunya tersebut Aristoteles telah membedakan 3 bentuk negara yang sempurna itu, tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataan yang ada adalah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa.

Bentuk Negara Menurut Aristoteles

Bentuk Sempurna

Monarkhi

Aristokrasi

Politeia

Bentuk Kemerotan

Despotie, Tiranie

Oligarkhi, Plutokrasi

Demokrasi

Dari data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Monarkhi adalah negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini yang bersifat baik.

Tiranie adalah negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini yang bersifat jeleknya.

Aristokrasi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, dan sifatnya itu baik karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum.

Oligarkhi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri.

Politeia adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat.

Demokrasi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja.

d. Epicurus

Epicurus hidup ketika kerajaan dunia dari raja Alexander Yang Agung terjatuh. Sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini berlangsung sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat, yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Epicurus menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles, yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Epicurus menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu inilah sebagai bagian yang terpenting, maka ajaran Epicurus tentang

sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan dari organismenya Aristoteles.

Negara menurut Epicurus adalah merupakan hasil dari perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusia adalah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Menurut Epicurus negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan.

Pada zaman Romawi ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak berkembang pesat. Namun demikian orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi. Meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Dan berkembanglah salah satu aliran ilmu negara yaitu aliran Calvinis.

Aliran Calvinis sama hanya dengan golongan Katolik. Aliran ini mendasarkan ajarannya pada kedaulatan Tuhan dan mengembalikan semua kekuasaan kepada Tuhan, hanya bedanya aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan juga tidak mengakui kekuasaan Paus. Kekuasaan negara adalah langsung berdasarkan kekuasaan Tuhan, sedangkan menurut ajaran golongan Katolik, kekuasaan negara secara tidak langsung didapat dari Tuhan melalui manusia dengan budinya yang berasal dari Tuhan. Menurut golongan Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian Tuhan yang dipegang oleh seorang Raja. Oleh karena itu, dalam negara-negara yang menganut paham tersebut di atas pengumuman mengenai undang-undangnya senantiasa didahului kalimat atas karunia Tuhan.

Golongan Calvinis beranggapan bahwa negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan-golongan yang telah ada dalam masyarakat, seperti keluarga, perusahaan-perusahaan, kesenian-kesenian. Asasnya yang terkenal ialah kedaulatannya di dalam lingkungannya sendiri, yang berarti bahwa mereka bebas dalam menyelenggarakan kepentingannya sendiri tanpa dicampuri oleh negara, karena mereka menganggap bahwa kedaulatan itu.

C. PENUTUP

Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Aliran-aliran dalam Ilmu Negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Aliran-aliran dalam Ilmu Negara diungkap menurut beberapa pendapat para filsuf jaman Yunani Kuno

diantaranya: Aliran Calvinis, Hegel, Karl Marx, Robert Owen, Saint Simon, Fourier, Bakunin. Menurut aliran Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh seorang raja. Kekuasaan negara menurut aliran ini dibatasi, bahwa negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan-golongan yang telah ada dalam masyarakat, seperti keluarga perusahaan, kesenian, dan lainlain. Asas yang terkenal pada aliran Calvinis adalah kedaulatannya di dalam lingkungannya sendiri, yang berarti bahwa mereka bebas dalam menyelenggarakan kepentingannya sendiri tanpa dicampuri oleh negara. Aliran calvinis memiliki faham yang sama dengan golongan katolik, aliran ini mendasarkan ajarannya pada kedaulatan tuhan dan mengembalikan semua kekuasaan kepada tuhan, hanya bedanya dengan golongan katolik yaitu aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari tuhan, dan juga tidak mengakui kekuasaan paus.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..